



**UNIVERSITAS MULA WARMAN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum dan Kebijakan Publik			T=?	P=?		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
					Dr. Wisnu	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	menguasai bidang Ilmu dan Teori Hukum atau jurisprudence secara mendalam dan utuh, serta berbagai teori filsafati tentang Ilmu dan Hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis terhadap penerapan Hukum Positif Indonesia.				
	CPL2	menguasai teori dari bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Internasional.				
	CPL3	mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	menguasai teori dan konsep kebijakan publik yang menjadi dasar penerapan pada hukum positif.				
	CPMK2	menguasai proses kebijakan publik yang menjadi bahan kajian utama pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar..				
	CPMK3	mampu melakukan kajian hukum dan kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah publik.				
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						

	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menyimpulkan pengertian kebijakan publik											
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisa peran negara dalam pembentukan kebijakan											
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menyimpulkan hakikat kebijakan publik											
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan publik menurut ilmu hukum											
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menganalisa strata kebijakan publik											
	Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu menganalisa macam kebijakan publik berdasarkan tipenya											
	Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu menganalisa hubungan kebijakan Publik dengan demokrasi & partisipasi masyarakat											
	Sub-CPMK8	Mahasiswa mampu menganalisa asas pembentukan kebijakan publik											
	Sub-CPMK9	Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan sebagai suatu proses dan model pembuatannya											
	Sub-CPMK10	Mahasiswa mampu menganalisa jenis dan hirarki peraturan kebijakan publik											
	Sub-CPMK11	Mahasiswa mampu menganalisa perumusan masalah kebijakan											
	Sub-CPMK12	Mahasiswa mampu menganalisa implementasi kebijakan publik											
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK												
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12
	CPL1	v											
	CPL2		v										
	CPL3		v	v									
	CPL4				v								
	CPL5					v	v	v	v	v	v	v	v
Deskripsi Singkat	Membahas hakekat kebijakan publik, pola-pola proses pengambilan kebijakan publik serta kaitannya dengan peran negara dalam pembentukan												

MK	kebijakan publik, asas pembentukan kebijakan publik, jenis dan hirarki peraturan kebijakan publik, proses kebijakan publik dari mulai perumusan isu publik kemudian implementasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, sampai dengan analisis kebijakan publik.				
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Kebijakan Publik 2. Peran Negara Dalam Pembentukan Kebijakan Publik 3. Hakikat Kebijakan Publik 4. Kebijakan Publik Menurut Ilmu Hukum 5. Strata Kebijakan Publik 6. Macam Kebijakan Publik Berdasarkan Tipenya 7. Hubungan kebijakan Publik dengan demokrasi & partisipasi masyarakat 8. Asas Pembentukan Kebijakan Publik 9. Kebijakan sebagai suatu proses dan model pembuatannya 10. Jenis dan Hirarki Peraturan Kebijakan Publik 11. Perumusan Masalah Kebijakan 12. Implementasi Kebijakan Publik 13. Evaluasi Kebijakan Publik 14. Analisa Kebijakan Publik 				
Pustaka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Utama :</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solichin Abdul Wahab. (2008). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Leo Agustino. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 3. Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Jakarta: Buku Kita. 4. Wayne Parsons.(2005). Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Predana Media. 5. M. Irfan Islamy. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Yogyakarta: Bumi Aksara. </td> </tr> <tr> <td>Pendukung :</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a. (2009). Memahami Ilmu Negara & Teori Negara. Bandung: Refika Aditama. 2. Mustopadidjaja AR. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI. 3. Sjachran Basah. (1992). Perlindungan Hukum terhadap sikap tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni. 4. Paulus Effendie Lotulung. (1994). Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B). Bandung: Citra Aditya Bakti. 5. Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. 6. Bambang Sunggono. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. 7. Muchsin dan Fadillah Putra. (2002). Hukum Dan Kebijakan Publik. Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press. 8. Eddi Wibowo. (2004). Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. 9. Soenarko (2000). Public Policy: pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah. Surabaya: Airlangga University </td> </tr> </table>	Utama :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solichin Abdul Wahab. (2008). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Leo Agustino. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 3. Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Jakarta: Buku Kita. 4. Wayne Parsons.(2005). Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Predana Media. 5. M. Irfan Islamy. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Yogyakarta: Bumi Aksara. 	Pendukung :	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a. (2009). Memahami Ilmu Negara & Teori Negara. Bandung: Refika Aditama. 2. Mustopadidjaja AR. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI. 3. Sjachran Basah. (1992). Perlindungan Hukum terhadap sikap tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni. 4. Paulus Effendie Lotulung. (1994). Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B). Bandung: Citra Aditya Bakti. 5. Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. 6. Bambang Sunggono. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. 7. Muchsin dan Fadillah Putra. (2002). Hukum Dan Kebijakan Publik. Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press. 8. Eddi Wibowo. (2004). Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. 9. Soenarko (2000). Public Policy: pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah. Surabaya: Airlangga University
Utama :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solichin Abdul Wahab. (2008). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Leo Agustino. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 3. Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Jakarta: Buku Kita. 4. Wayne Parsons.(2005). Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Predana Media. 5. M. Irfan Islamy. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Yogyakarta: Bumi Aksara. 				
Pendukung :	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a. (2009). Memahami Ilmu Negara & Teori Negara. Bandung: Refika Aditama. 2. Mustopadidjaja AR. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI. 3. Sjachran Basah. (1992). Perlindungan Hukum terhadap sikap tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni. 4. Paulus Effendie Lotulung. (1994). Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B). Bandung: Citra Aditya Bakti. 5. Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. 6. Bambang Sunggono. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. 7. Muchsin dan Fadillah Putra. (2002). Hukum Dan Kebijakan Publik. Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press. 8. Eddi Wibowo. (2004). Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. 9. Soenarko (2000). Public Policy: pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah. Surabaya: Airlangga University 				

- Press.
10. Moekijat. (1995). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.
 11. Samodra Wibawa et. al. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 12. Samodra Wibawa. (1994). Kebijakan Publik : Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
 13. Riant Nugroho. (2012). Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Dosen Pengampu Agustinawati,S.H.,M.H.

Matakuliah syarat

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menyimpulkan pengertian kebijakan publik	Kemampuan menguraikan identitas, deskripsi dan tujuan matakuliah	TM	Perkenalan • Kuliah Interaktif		Pengertian Kebijakan Publik	2%
2	Mahasiswa mampu menganalisa peran negara dalam pembentukan kebijakan	Kemampuan membedakan Sistem Peradilan Pidana dengan Hukum Acara Pidana • Keaktifan dalam diskusi kelompok • Ketepatan hasil analisis kasus • Kemampuan	TM, PT	Kuliah Interaktif		Peran Negara Dalam Pembentukan Kebijakan Publik	5%

		bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun					
3-4	Mahasiswa mampu menyimpulkan hakikat kebijakan publik	Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	TM, PT			Hakikat Kebijakan Publik	
5	Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan publik menurut ilmu hukum	Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun				Kebijakan Publik Menurut Ilmu Hukum	4%
6	Mahasiswa mampu menganalisa strata kebijakan publik	• Ketepatan membedakan konsep desentralisasi di beberapa negara •	TM, PT	Kuliah Interaktif • Diskusi		Strata Kebijakan Publik	6%

		Keaktifan dalam diskusi • Ketepatan hasil diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun					
7	Mahasiswa mampu menganalisis macam-macam kebijakan publik berdasarkan tipenya	• Ketepatan menguraikan materi • Keaktifan dalam diskusi • Ketepatan hasil diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun	TM, PT	Kuliah Interaktif • Diskusi		Macam Kebijakan Publik Berdasarkan Tipenya	6%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						20%
9	Mahasiswa mampu menganalisis hubungan kebijakan Publik dengan demokrasi & partisipasi masyarakat	Ketepatan mengidentifikasi materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	TM, PT	Kuliah Interaktif		Hubungan kebijakan Publik dengan demokrasi & partisipasi masyarakat	4%
10	Mahasiswa mampu menganalisis asas pembentukan kebijakan publik	Ketepatan menghubungkan materi • Kemampuan	TM, PT	Kuliah Interaktif		Asas Pembentukan Kebijakan Publik	4%

		bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun					
11	Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan sebagai suatu proses dan model pembuatannya	Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	TM, PT	Kuliah Interaktif • Case Study		Kebijakan sebagai suatu proses dan model pembuatannya	6%
12	Mahasiswa mampu menganalisa jenis dan hirarki peraturan kebijakan publik	Ketepatan membedakan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	TM, PT	Kuliah Interaktif		Jenis dan Hirarki Peraturan Kebijakan Publik	3%
13-14	Mahasiswa mampu menganalisa perumusan masalah kebijakan	Kemampuan menganalisis aturan • Keaktifan dalam diskusi kelompok •	TM, PT	Kuliah Interaktif • Case Study		Perumusan Masalah Kebijakan	6%

		Ketepatan hasil analisis kasus • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun					
15	Mahasiswa mampu menganalisa implementasi kebijakan publik	Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan menyatakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	TM, PT	Kuliah Interaktif		Implementasi Kebijakan Publik	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						25%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.